

1.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran politik modern di Indonesia mulai sejak bangkitnya nasionalisme tahun 1900 yang diawali dengan munculnya sekelompok mahasiswa yang membentuk perkumpulan Budi Utomo. Pemikiran mereka berkembang lebih jauh, mereka tidak hanya berbicara tentang Belanda yang menjajah Indonesia, tetapi bagaimana mengusir penjajahan dan mencapai kemerdekaan bangsa dan negara itu sendiri.

Dalam perkembangan selanjutnya, kaum pergerakan Indonesia melaksanakan perjuangan lebih menyeluruh dalam organisasi yang lebih kuat, yang diwujudkan dalam sebuah kongres tanggal 28 Oktober 1928 disebut dengan Sumpah Pemuda.

(Menurut Mc.T. Kahin: 1995: 25)mengatakan bahwa:

Dengan telah dilaksanakan ikrar-ikrar nasionalis pertama pada saat itu, penentuan Bendera dan Lagu Kebangsaan, serta keputusan agar bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia yaitu bahasa nasional yang akan dilahirkan sebagian besar golongan berpendidikan modren mengikat diri kepada perjuangan baru yang memukau yang bernama Indonesia. (Herbeth Fiith, 1989).

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia di Proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, para elit politik Indonesia mulai memikirkan cara mengisi kemerdekaan guna mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materil maupun sprituil yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Salah satu tokoh politik yang sangat berpengaruh di hari-hari menjelang proklamasi kemerdekaan dan sesudahnya adalah Sutan Sjahrir. Ia adalah seorang arsitek terjadinya pergeseran sistem pada November 1945, yaitu dari Presidensial sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 yang pertama menjadi sistem Parlementer. Suatu pergeseran yang dicapai bukan melalui perubahan UUD melainkan dengan diterimanya konvensi yang menyatakan UUD akan berjalan di dalam sistem Parlementer. Kemudian selaku perdana menteri, Sjahrir adalah orang yang bertanggung jawab mengemudikan republik yang masih sangat muda pada saat itu dalam melewati bahaya yang mengelilinginya, dan ia berhasil meraih pengakuan dari dunia luar bagi kedaulatan Indonesia.

Sifat strategi Sjahrir sebagian terungkap dalam responnya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Agustus 1945 dan sebagian dalam manuver-manuver politik berikutnya yang menempatkan dirinya pada kedudukan sebagai perdana menteri sejak 1945-1948, juga ketika pemerintahannya mendapatkan tekanan-tekanan dari dalam dan luar negeri. Sejumlah asas pedoman dapat kita lihat dalam tindakan-tindakannya selama periode itu, diantaranya ada yang merupakan perpanjangan atau revolusi pandangan itu dalam rangka situasi yang berkembang.

Pertama, yang terpenting bagi Sjahrir adalah bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia harus berada anti-fasis. Hal tersebut merupakan konsekuensi perspektif yang sudah ia kembangkan mengenai arah perkembangan peristiwa-peristiwa di dunia pada dasawarsa 1930-an. Pembebasan dan perkembangan Indonesia sebagai negara republik yang demokratis dan sosialis mendapatkan tempat dalam

persefektif tersebut. Kedua, potensi otoriter yang terkandung dalam proses revolusi. Dengan memperhitungkan ketidakjelasan situasi dan kemungkinan akan terjadinya kekacauan setelah kekalahan Jepang, maka Sjahrir menginginkan agar kemerdekaan diproklamasikan setertib mungkin dan melalui apa yang dianggap sebagai suatu otoritas Indonesia yang terbentuk sebagai mana mestinya.

Ada dua prinsip yang saling berseberangan dalam menyikapi perbedaan penilaian terhadap kegiatan Sjahrir, Soekarno, dan Hatta semasa pendudukan Jepang. Kegiatan aksi Sjahrir dilakukan secara diam-diam sambil terus berhubungan dengan para pemimpin yang lebih tua dan terkemuka, terutama dengan memusatkan kegiatannya pada upaya membangun gerakan perlawanan bawah tanah yang menentang Jepang. Sedangkan Soekarno Hatta memakai jalan kerjasama secara terbuka dengan pemerintah pendudukan Jepang, dan sedapat mungkin memperlunak perlakuan Jepang. Bahkan, bila dimungkinkan, memanfaatkan jabatan resmi mereka di bawah kekuasaan Jepang untuk membela perjuangan kebangsaan.

Pada akhir Oktober 1946, Sjahrir menerbitkan buklet kecil, dengan judul *Perjuangan Kita*, yang disebarakan selama hari-hari pertama pada November 1946. Buklet ini sangat mempengaruhi pemikiran politik Indonesia, terutama dikalangan buruh yang dulu ikut gerakan bawah tanah, dikalangan pemuda berpendidikan. Dalam buklet ini menyerukan para pemuda untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab, berjuang dengan segenap jiwa revolusionernya, terutama menghindari kekerasan anti-asing dan anti-indo, dan mengerahkan kekuatan

mereka ke arah pembentukan suatu pemerintah yang demokratis, non fasis serta non-feodalis.

Orang Indonesia harus membedakan aspek bagian luar dari revolusi mereka, yaitu nasionalisme, dan aspek sosial yang merupakan bagian dalamnya. Ada bahaya besar jika dalam memusatkan aspek nasionalisme, revolusi itu berdasarkan demokrasi, maka aspek sosial bagian dalam itu akan dilupakan. Dengan melihat warisan feodal yang terus hidup dengan kuat, maka penyerapan aspek nasionalistis untuk menghilangkan aspek demokrasi internal yang akan menggiring ke arah fasisme adalah feodalisme dan supernasionalisme, tetapi demokrasi.

Sjahrir menyerukan agar rakyat Indonesia menolak semua pemimpin yang pernah aktif berkolaborasi dengan Jepang dan Belanda, dan mempercayakan kepemimpinan revolusi hanya kepada mereka yang tidak ternoda oleh hubungan semacam itu dari tujuan akhirnya adalah demokrasi, ia menyatakan: Revolusi kita harus di pimpin oleh kelompok-kelompok demokratis yang revolusioner Dan bukan oleh kelompok-kelompok yang pernah menjadi antek-antek fasis, fasis, fasis kolonial, atau fasis militer Jepang.

Perjuangan demokrasi revolusioner itu di mulai dengan membersihkan diri dari noda-noda fasis Jepang, mengukung pandangan orang-orang yang jiwanya masih termakan oleh pengaruh propoganda Jepang dan didikan Jepang.

Orang-orang yang menjual jiwa dan kehormatannya kepada fasis Jepang harus di singkirkan dari kepemimpinan revolusi kita, yaitu orang-orang yang pernah

bekerja dalam organisasi propoganda Jepang, polisi rahasia Jepang, umumnya dalam usaha pasukan kelima jepang. Semua orang ini harus di anggap sebagai penghianat perjuangan dan harus di bedakan dari kaum buruh biasa yang bekerja yang hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, semua kolaborator politik dengan fasis Jepang seperti yang disebutkan di atas harus dianggap sebagai fasis sendiri atau alat dan kaki tangan Jepang, yang sudah tentu berhianat kepada perjuangan revolusi rakyat.

Dimasa revolusi fisik, karier Sjahrir dibidang politik dan diplomasi bermula sejak keluarnya maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945, dimana ia terpilih sebagai Ketua Badan Pekerja KNIP, disertai kekuasaan Legislatif, untuk bersama-sama dengan Presiden menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.” (Maeswara, Garda : 2010:44). Sejak tanggal 14 November 1945 Sjahrir naik ke pucuk pimpinan pemerintah sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia dalam usia 36 tahun, kepemimpinan Sjahrir berlangsung dalam 3 periode yaitu :

1. Kabinet pertama, yaitu 14 November 1945- 12 Maret 1946.
2. Kabinet kedua, 13 Maret 1946 – 2 Oktober 1946.
3. Kabinet ketiga, 2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947.

Selama memimpin pemerintahan, Perdana Menteri Sutan Sjahrir memegang peranan penting, dari tahun 1945 hingga 1947, pengaruhnya sangat mendalam terhadap perjalanan revolusi Indonesia. Ia melakukan perundingan dengan pihak Belanda untuk menyelesaikan konflik antara Belanda dan Indonesia di bawah pengawasan Internasional, yaitu PBB. Sutan Sjahrir melaksanakan cara

penyelesaian konflik yang berbeda dengan para tokoh revolusioner Indonesia pada saat itu seperti Tan Malaka dan yang lainnya. Di saat yang lain menyelesaikan persoalan konflik dengan Belanda melalui perlawanan militer (perang), Sjahrir justru memilih jalan damai yaitu diplomasi. Seraya memperkirakan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan kedua belah pihak. Sjahrir berkesimpulan bahwa Indonesia harus mengakui kekuatan militer sekutu yang jauh lebih unggul. Jika penyelesaian konflik pasca kemerdekaan dilakukan dengan cara-cara militer maka Indonesia tidak akan bisa *survive* dan memenangkan pertempuran-pertempuran karena kelemahan persenjataan yang dimiliki Indonesia pada saat itu.

Langkah yang diambil Sjahrir sejak di serahi tampuk pemerintahan sebagai Perdana Menteri pada tanggal 14 November 1945 adalah berdiplomasi. Sjahrir berpendapat bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan, Indonesia harus mengadakan perjanjian dengan Belanda agar mengakui berdirinya Indonesia.” (Buku Tempo, 2010: 75).

Upaya diplomasi ini dimaksudkan untuk menutup semua tudingan Belanda yang mengucilkan Indonesia sebagai negara yang tidak aman sehingga membutuhkan bantuan dari pihak asing. Kebijakan diplomasi yang dilakukan Sjahrir selama menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia merupakan cerminan dari pemikiran politik yang dia miliki. Sjahrir berpendapat bahwa dalam politik, mempertaruhkan hidup adalah untuk memenangkan hidup.” (Rosihan Anwar, xiv:2011). Dan dalam mempertaruhkan hidup, bangsa Indonesia harus memiliki

pilihan-pilihan yang cerdas dan realistis. Hal-hal yang tidak bisa dihadapi dengan senjata, bisa disiasati dengan diplomasi. Hal tersebutlah yang menjadi pijakan bagi Sjahrir dalam menentukan kebijakn-kebijak politiknya selama menjabat sebagai Perdana Menteri.

Sjahrir mengumumkan dalam diplomasinya bahwa Jakarta adalah kota internasional. Agar program ini menarik perhatian dunia, digelarlah pameran kesenian yang di publikasikan oleh sejumlah wartawan luar negeri. Setelah itu Sutan Sjahrir mulai mengenalkan Indonesia di forum-forum Internasional, seperti Konfrensi Asia di New Delhi pada 1946. tak hanya itu, Sjahrir juga mencuri perhatian dengan memberikan bantuan kemanusiaan berupa sumbangan beras. Tidak semua setuju terhadap langka Sjahrir berunding dengan bekas penjajah.” (Buku Tempo,2010 : 75).

Partai Masyumi dan Partai Nasional Indonesia menolak. Kelompok penentang yang paling keras adalah Persatuan Indonesia yang di motori oleh Tan Malaka. Sjahrir dianggap terlalu banyak memberikan konsesi kepada Belanda. Ia dan para pengikutnya di ejek sebagai “anjing-anjing Belanda”. Menghadapi perlawanan oposisi, Sjahrir tak ambil pusing. Menurut Sjahrir berjuang di meja perundingan punya keuntungan politis memperoleh pengakuan kekuasaan *defacto*. Ia jalan terus, apalagi Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta berdiri di belakangnya “(Anwar, Rosihan, 2010: 75)

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada deskripsi diatas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan memberi arah penelitian ini, yaitu :

1. Dampak kebijakan politik diplomasi Perdana Menteri Sutan Sjahrir sebagai pimpinan Pemerintah untuk Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.
2. dampak pemberlakuan politik diplomasi Perdana Menteri Sutan Sjahrir untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
3. Dampak Kebijakan politik Perdana Menteri Sutan Sjahrir dalam Diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia

2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang diteliti, maka penulis membatasi masalah yaitu kebijakan politik Perdana Menteri Sutan Sjahrir dalam diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apasaja Kebijakan politik Perdana Menteri Sutan Sjahrir dalam Diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia?

B. Tujuan dan Kegunaan, dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan diplomasi Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat memberikan pengetahuan serta wawasan khususnya dibidang kesejarahan yakni mengenai kebijakan diplomasi Sutan Sjahrir sebagai untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
- b. Sebagai suplemen dalam mempelajari materi Sejarah, baik di Sekolah maupun Perguruan Tinggi khususnya Sejarah Kemerdekaan Indonesia

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Subjek Penelitian : Perdana Menteri Sutan Sjahrir
2. Objek Penelitian : Kebijakan politik diplomasi Sutan Sjahrir
Sebagai Perdana Menteri Indonesia
Untuk mempertahankan kemerdekaan RI
3. Tempat Penelitian : Perpustakaan Universitas Lampung,
Perpustakaan Daerah Lampung.
4. Waktu Penelitian : Tahun 2013
5. Ruang Lingkup Ilmu : Sejarah Politik

REFERENSI

- Anwar Rosihan. 2011. *Sutan Sjahrir, Negarawan Humanis, Demokrat Sejati Yang Mendahului zamannya*. Buku Kompas. Jakarta. Halaman xiv.
- Buku Tempo. 2010. *Sjahrir, Peran Besar Bung Kecil*. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta. Halaman 75.
- Herbert Feith. 1989. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. LP3ES. Jakarta. Halaman Px.
- J.D. Legge. 2003. *Kaum Intelektual Dan Perjuangan Kemerdekaan*. PT Temprint. Jakarta. Halaman 168.
- Maeswara Garda . 2010.2010. *Sejarah Revolusi Indonesia 1945, Perjuangan Bersenjata Dan Diplomasi Untuk Mempertahankan Kemerdekaan*. Penerbit Narasi. Jakarta. Halaman 44
- _____ *Ibid.* Halaman 85.
- _____ *Ibid.* Halaman 138
- Mandaralam Syahbudin. 1966. *Apa Dan Siapa Sutan Syahrir*. PT Rosda RJ Jaya Putra. Bandung. Halaman 47.